PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Pusat Pemerintahan Gedung A Lt. 4 Jalan Raden Puguh Praya 83511
Website: http://dinaspupr.lomboktengahkab.go.id E-mail: perencanaanpuprlomboktengah@gmail.com

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026

Laporan ini menganalisis faktor pendorong dan penghambat kinerja serta tindak lanjut DPUPR berdasarkan notulensi Triwulan III.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Monitoring dan evaluasi berfungsi sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan rencana kerja, pemantauan pencapaian target, dan penyusunan tindakan korektif. Bagi DPUPR, fungsi ini menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Tanpa tindak lanjut yang terdokumentasi, hambatan yang sama berpotensi berulang pada triwulan berikutnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Monev ini menilai perkembangan pelaksanaan kinerja, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat, merumuskan langkah perbaikan, dan menyediakan bahan penyempurnaan Renja tahun berikutnya.

1.3 Ruang Lingkup

Pembahasan mencakup Triwulan I sampai Triwulan III Tahun Anggaran 2026. Sumber yang digunakan adalah notulensi Monev 4 Agustus 2026 (Triwulan II), Rapat Koordinasi 7 September 2026, Evaluasi Progres Fisik 6 Oktober 2026, dan Matriks RTL Triwulan II.

1.4 Keterbatasan Data

Beberapa angka dan status pada bahan sumber tidak konsisten atau belum dilaporkan. Hal berikut perlu dikonfirmasi sebelum data digunakan dalam dokumen resmi:

- Triwulan I: tidak ada notulensi atau laporan Monev. Nilai nol pada indikator fisik dan keuangan merupakan asumsi tahap perencanaan dan persiapan kontrak, belum berupa data terverifikasi.
- Target indikator kinerja dari Renstra, Renja, dan PK tidak tersedia dalam bahan, sehingga pencapaian terhadap target belum dapat dihitung.
- Notulensi 6 Oktober memuat Matriks RTL berlabel Triwulan II dan Kesimpulan yang identik dengan notulensi 4 Agustus. Keduanya tidak dipakai sebagai bukti Triwulan III.
- Target progres Jembatan Aik Bual tercatat 2% (4 Agustus), 14,61% (7 September), dan 47,628% (6 Oktober). Target Jalan Kidang–Semoyan tercatat 4,35% (7 September) dan 10,415% (6 Oktober). Keduanya perlu direkonsiliasi dengan dokumen kontrak.
- Batas kontrak jembatan tercatat 20 Oktober (notulensi 7 September) dan 28 Oktober (notulensi 6 Oktober).

- Jumlah PKKPR dan informasi ruang berbeda antarnotulensi: 43 dan 195 (4 Agustus), 299 (Triwulan I), 14 dan 62 (Triwulan II), serta 44 dan 75 (Triwulan III). Periode pencatatan perlu dipastikan.
- SP1 (2) dan SP2 (4) tercatat pada 4 Agustus dan kembali tercatat pada 6 Oktober sebagai Triwulan III. Perlu dipastikan tidak terhitung ganda.
- Capaian sanitasi aman tercatat 2,75% menjadi 3,4% (4 Agustus) dan 2,8% menjadi 3,3% (7 September).
- Usulan Inpres tercatat 5 usulan senilai Rp35 miliar (4 Agustus), 5 lokasi (7 September), dan 5 paket disetujui dengan 4 paket rehabilitasi (6 Oktober).
- Status Triwulan III belum dilaporkan untuk EFAKSI, OP irigasi, RISPAM, pemanfaatan L2T2, honorarium FPR, dan tiga pekerjaan SDA yang melewati batas 25 September.

II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Kinerja

Pada Triwulan II dan III, capaian fisik terlihat pada paket Bina Marga, Cipta Karya, dan SDA. Sejumlah paket jembatan, SPAM, dan proses penetapan ruang tertinggal dari rencana. Kinerja Triwulan I belum dapat dinilai karena data tidak tersedia.

2.2 Evaluasi Kinerja Triwulan I

Evaluasi Triwulan I terbatas. Seluruh indikator fisik dan keuangan diasumsikan bernilai nol sesuai tahap perencanaan dan persiapan kontrak, dengan satu capaian tercatat berupa 299 PKKPR dan informasi ruang dari Bidang Tata Ruang. Faktor pendorong tidak dapat dinilai dari realisasi, dan kendala persiapan kontrak belum dapat dirinci. Tindak lanjut Triwulan I juga tidak dapat ditelusuri, sehingga statusnya belum dapat dinyatakan.

2.3 Evaluasi Kinerja Triwulan II (Monev 4 Agustus 2026)

Tabel 2.1. Capaian dan permasalahan Triwulan II (Monev 4 Agustus 2026)

Bidang	Capaian	Permasalahan
Bina Marga	72 dari 92 paket Pokir selesai; kontrak Agustus 89%	Paket urgent Desa Pringgarata baru 40% dari batas 17 Agustus. Jembatan Aik Bual 0,3% dari rencana 2% akibat perbedaan jenis tanah dan kedalaman tanah keras dari sondir awal. Jalan Kidang–Semoyan 0,87% dari target 2,28% karena penyesuaian mutu beton dan tahap MC-0 belum selesai. Jembatan Pokir baru 20%.
Cipta Karya Air Limbah	Progres fisik 97,73%; 20 paket PHO	RISPAM belum selesai sehingga Readiness Criteria DAK SPAM Cerorong Danau Biru (Rp2 miliar) belum terpenuhi. Pelaporan DAK baru 27%. Operator lalai mengisi laporan di 4 lokasi.
SDA	11 paket rehabilitasi irigasi PHO (progres 63%, serapan 83%); 4 paket peningkatan jaringan PHO (progres 82%)	EFAKSI baru 5%. OP irigasi belum dilaksanakan.
Tata Ruang	Verifikasi LBS 43.534,85 Ha (87,36% dari 49.000 Ha)	Penetapan dokumen tata ruang menunggu pembahasan lintas sektor di Kementerian. Honorarium anggota FPR belum tuntas dan berpotensi menghambat PKKPR.

Bidang	Capaian	Permasalahan
UPT Air Limbah	Sanitasi aman naik dari 2,75% menjadi 3,4% pada Semester I; pilot L2T2 melibatkan 100 pelanggan	Pemanfaatan belum optimal: suplai 3 m³/hari dari kapasitas 25 m³/hari, target efektivitas 14 m³/hari.
Monev	Forum evaluasi lintas bidang tersedia dan menghasilkan arahan tindak lanjut	Kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan belum optimal.

Analisis:

- Faktor pendorong: paket fisik yang sudah PHO pada Bina Marga, Cipta Karya, dan SDA, serta forum evaluasi lintas bidang.
- Faktor penghambat: kesiapan dokumen teknis (sondir awal yang tidak sesuai kondisi tanah), RISPAM, pembahasan lintas sektor tata ruang, dan kelalaian pelaporan operator.
- Permasalahan yang berlanjut hingga Triwulan III: jembatan dan jalan Kidang–Semoyan, RISPAM dan pelaporan DAK, EFAKSI dan OP irigasi, honorarium FPR, serta pemanfaatan L2T2.
- Tindak lanjut Triwulan III yang dirumuskan mencakup monitoring mingguan jembatan, target penyelesaian RISPAM, checklist pelaporan, target EFAKSI, dan target penambahan pelanggan L2T2. Status pelaksanaannya belum dapat dibuktikan dari bahan Triwulan III.
- Kebutuhan perbaikan Renja: survei dan uji tanah sebelum DED, RISPAM sebagai dasar usulan SPAM, serta target volume L2T2 dalam Renja 2027.

2.4 Evaluasi Kinerja Triwulan III (Rakor 7 September dan Evaluasi 6 Oktober 2026)

Tabel 2.2. Capaian dan permasalahan Triwulan III (Rakor 7 September dan Evaluasi 6 Oktober 2026)

Bidang	Capaian	Permasalahan
Bina Marga	89 dari 92 paket pengadaan langsung selesai (7 September). 92 paket Pokir PHO dan pembayaran diproses. 3 dari 7 paket jembatan selesai. Agregat I dilaksanakan (6 Oktober).	3 paket pengadaan langsung belum selesai. 5 paket belanja modal tertunda menunggu produksi aspal. 6 paket jembatan belum selesai dengan batas kontrak 20 atau 28 Oktober. Masa tunggu umur beton sekitar 1 minggu. 5 dari 18 ruas pemeliharaan rutin tidak dapat dikerjakan karena rusak berat. Material pemeliharaan belum memenuhi standar.
Cipta Karya	Penataan bangunan gedung 100% (Masjid Tandik 90% pada 7 September). Sanitasi reguler APBD 100% di 22 lokasi Pokir. SPAM Pokir 9 paket 100%.	SPAM Mandalika baru 10% (sekitar 600 SR di 3 desa). Program penunjang 5 paket baru 65% dengan sisa kontrak hingga Oktober.
SDA	15 paket konstruksi selesai. Realisasi anggaran Rp2,3 miliar dari pagu Rp2,7 miliar (sekitar 83%).	3 pekerjaan konstruksi melewati batas kontrak 25 September dan status terbaru belum dilaporkan. Swakelola Rp210 juta (6 lokasi) dialihkan ke Perubahan. Anggaran material Rp35 juta per lokasi belum disertai anggaran upah pekerja.
Tata Ruang	Pengendalian ruang melampaui target 4 kasus, dengan 2 SP1 dan 4 SP2 diterbitkan. 44 PKKPR dan 75 informasi ruang diterbitkan (6 Oktober).	RTRW belum ditetapkan karena menunggu lintas sektor. Insentif lahan sawah belum jelas. RDTR tertunda menunggu RTRW. 38 dari 245 permohonan dikembalikan.
UPT Air Limbah	Belum ada capaian tercatat	IPLT belum memiliki dokumen standar teknis sesuai Permen LH. Uji baku mutu air limbah belum dilakukan. Data pemanfaatan L2T2 Triwulan III belum dilaporkan.

Analisis:

- Perkembangan sampai Triwulan III: seluruh 92 paket Pokir sudah PHO (naik dari 72 paket pada Triwulan II), tetapi penyelesaian jembatan masih rendah (3 dari 7 paket).
- Faktor pendorong: penyelesaian paket Pokir dan SPAM Pokir, serta realisasi anggaran SDA sekitar 83%.
- Faktor penghambat: pelaksana mengerjakan beberapa paket bersamaan, produksi aspal yang belum terjadwal, masa tunggu beton, serta swakelola yang belum memiliki kejelasan teknis.
- Risiko terhadap target akhir tahun: enam paket jembatan dengan batas kontrak Oktober, tiga pekerjaan SDA yang melewati batas 25 September, SPAM Mandalika yang baru 10%, dan swakelola yang dialihkan ke Perubahan.
- Target akhir tahun belum dapat disimpulkan tercapai atau tidak tercapai. Target indikator tidak tersedia dalam bahan, dan status sejumlah pekerjaan belum dilaporkan.

III. ANALISIS FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

Sintesis tiga triwulan menunjukkan empat permasalahan yang berulang pada Triwulan II dan III: pelaporan operator dan verifikasi data, pembahasan lintas sektor tata ruang, pemanfaatan IPLT dan L2T2, serta honorarium FPR. Keberhasilan terkonsentrasi pada paket fisik yang terstandar, yaitu Pokir, SPAM Pokir, sanitasi reguler, dan penataan bangunan gedung. Keterlambatan realisasi bukan satu-satunya penjelasan, karena kendala teknis, kelembagaan, dan pelaporan juga teridentifikasi.

Tabel 3.1. Analisis faktor pendorong dan penghambat kinerja

Kelompok	Kondisi yang Ditemukan	Penyebab yang Dapat Dibuktikan	Dampak terhadap Kinerja	Penanganan yang Relevan
Kesiapan perencanaan dan dokumen teknis	Sondir awal Jembatan Aik Bual tidak sesuai kondisi tanah. Mutu besi beton Kidang–Semoyan disesuaikan ke mutu 200.	Survei dan investigasi teknis awal belum memadai, sebagaimana dicatat dalam RTL Triwulan II.	Deviasi progres Jembatan Aik Bual −1,7% pada Triwulan II. Tahap MC-0 Kidang–Semoyan belum selesai.	Uji tanah sebagai dasar desain. Peningkatan kualitas survei sebelum DED.
Proses pengadaan dan pelaksanaan	Pelaksana mengerjakan beberapa paket bersamaan. 3 paket pengadaan langsung belum selesai. 5 paket belanja modal menunggu produksi aspal.	Kapasitas pelaksana dan jadwal produksi aspal yang belum sinkron, sebagaimana tercatat pada Triwulan III.	Enam paket jembatan berisiko melewati batas kontrak 20 atau 28 Oktober.	Jadwal kerja per paket. Persyaratan kapasitas penyedia. Koordinasi jadwal produksi aspal.
Anggaran dan penyesuaian	Swakelola Rp210 juta dialihkan ke Perubahan. Material Rp35 juta per lokasi belum disertai anggaran upah. Honorarium FPR belum tuntas.	Kejelasan teknis swakelola belum tersedia. Kebutuhan anggaran upah belum dihitung.	Kegiatan swakelola tertunda. Honorarium FPR berpotensi menghambat PKKPR.	Keputusan teknis swakelola sebelum usulan Perubahan. Penyediaan anggaran administrasi FPR.

Kelompok	Kondisi yang Ditemukan	Penyebab yang Dapat Dibuktikan	Dampak terhadap Kinerja	Penanganan yang Relevan
Kondisi teknis dan lapangan	5 dari 18 ruas pemeliharaan rutin rusak berat. Material pemeliharaan belum memenuhi standar. SPAM Mandalika baru 10%. OP irigasi belum dilaksanakan.	Material dari penyedia belum memenuhi standar mutu. Ruas rusak berat tidak dapat dikerjakan dengan kontrak pemeliharaan rutin.	Pemeliharaan rutin tidak tuntas. Target sambungan SPAM belum tercapai.	Uji mutu material. Penetapan penanganan lima ruas rusak berat. Percepatan pemasangan SR.
Ketersediaan data dan pelaporan	Operator lalai mengisi laporan di 4 lokasi. Pelaporan DAK baru 27%. Data PKKPR berbeda antarnotulensi. Data L2T2 Triwulan III belum dilaporkan.	Belum ada PIC dan checklist pelaporan sebagaimana dirumuskan dalam RTL Triwulan II.	Kinerja sulit diverifikasi. Syarat readiness DAK berisiko tidak terpenuhi.	Penetapan PIC dan checklist pelaporan. Verifikasi laporan sebelum batas waktu.
Koordinasi lintas sektor dan perangkat daerah	RTRW dan LP2B belum ditetapkan karena menunggu lintas sektor. RDTR tertunda menunggu RTRW. Insentif lahan sawah belum jelas. 38 dari 245 permohonan dikembalikan.	Pembahasan di tingkat Kementerian belum tuntas. Kelengkapan dokumen permohonan belum memenuhi standar.	Tahapan penetapan ruang berikutnya tertunda. Layanan PKKPR terhambat.	Penyiapan dokumen pendukung pembahasan. Koordinasi insentif dengan perangkat daerah terkait. Standar dokumen permohonan.
Pengendalian dan tindak lanjut monitoring	Status RTL Triwulan II belum dinyatakan. Tiga pekerjaan SDA melewati batas 25 September dengan status belum dilaporkan.	Matriks RTL Triwulan III memuat ulang matriks Triwulan II secara identik. Status tindak lanjut tidak tercatat dalam bahan.	Permasalahan berulang tanpa penyelesaian yang dapat dibuktikan.	Verifikasi ulang matriks RTL. Penetapan status tindak lanjut. Monitoring berjenjang dan early warning.

IV. RENCANA TINDAK LANJUT

4.1 Tindak Lanjut Triwulan IV

Tindak lanjut berikut disusun dari kondisi yang tercatat dalam bahan. Periode pelaksanaan mengikuti batas waktu yang tersedia dalam data. Penanggung jawab dan tenggat belum ditetapkan karena tidak tersedia dalam bahan.

Tabel 4.1. Rencana tindak lanjut Triwulan IV

No.	Permasalahan/Temuan Monev	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Periode Pelaksanaan	Keterkaitan dengan Renja Berikutnya
1	Enam paket jembatan belum selesai. Batas kontrak 20 atau 28 Oktober belum dikonfirmasi. Status paket Pringgarata tidak dilaporkan pada Triwulan III.	Konfirmasi batas kontrak dari dokumen kontrak. Lakukan monitoring fisik mingguan. Minta penyedia menyusun jadwal percepatan. Pastikan paket Pringgarata selesai sesuai batas kontrak.	Oktober 2026 (segera)	Survei dan uji tanah sebelum penyusunan DED jembatan.

No.	Permasalahan/Temuan Monev	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Periode Pelaksanaan	Keterkaitan dengan Renja Berikutnya
2	Pelaksana mengerjakan banyak paket bersamaan. 3 paket pengadaan langsung belum selesai. 5 paket belanja modal menunggu produksi aspal.	Atur jadwal kerja per paket. Koordinasikan jadwal produksi aspal untuk lima paket belanja modal.	Oktober–Desember 2026	Kalender pengadaan yang memperhitungkan produksi aspal dan masa tunggu beton. Persyaratan kapasitas penyedia.
3	Tiga pekerjaan SDA melewati batas 25 September. Status dan tindakan kontraknya belum dilaporkan.	Konfirmasi status dan tindakan kontrak setiap pekerjaan. Laporkan hasilnya.	Oktober 2026 (segera)	Mekanisme pengendalian kontrak yang melewati batas waktu.
4	Swakelola Rp210 juta dialihkan ke Perubahan karena kejelasan teknis belum ada. Material Rp35 juta per lokasi belum disertai anggaran upah.	Tetapkan keputusan teknis swakelola sebelum usulan Perubahan diajukan.	Sebelum usulan Perubahan diajukan	Mekanisme swakelola dengan standar teknis dan kebutuhan anggaran upah sebelum penganggaran.
5	5 dari 18 ruas pemeliharaan rutin rusak berat. Material pemeliharaan belum memenuhi standar.	Tetapkan penanganan lima ruas rusak berat. Lakukan uji mutu material pemeliharaan rutin.	Oktober–Desember 2026	Survei kondisi ruas sebelum penganggaran pemeliharaan rutin. Standar mutu material.
6	SPAM Mandalika baru 10% (sekitar 600 SR di 3 desa). Program penunjang 5 paket baru 65% dengan sisa kontrak hingga Oktober. Masjid Tandik 90% pada 7 September.	Evaluasi progres SPAM Mandalika dan percepat pemasangan SR. Percepat program penunjang dan Masjid Tandik.	Oktober 2026 (sisa kontrak)	Jadwal kontrak program penunjang dan SPAM dengan batas penyelesaian dalam tahun anggaran. Pengendalian progres SPAM sejak perencanaan.
7	RISPAM belum selesai. Readiness Criteria DAK SPAM Cerorong Danau Biru belum terpenuhi. Pelaporan DAK di 4 lokasi belum lengkap.	Tetapkan target penyelesaian RISPAM dan rapat khusus RISPAM–RC. Konfirmasi status RISPAM. Tetapkan PIC dan checklist pelaporan DAK.	Triwulan IV 2026	RISPAM sebagai dasar usulan SPAM. Daftar readiness criteria dan mekanisme pelaporan DAK sejak awal tahun.
8	RTRW dan RDTR belum ditetapkan karena menunggu lintas sektor. Insentif lahan sawah belum jelas.	Siapkan dokumen pendukung pembahasan lintas sektor dan tindak lanjuti hasilnya bersama Kementerian. Koordinasikan kepastian insentif lahan sawah dengan perangkat daerah terkait.	Triwulan IV 2026	Urutan penetapan RTRW dan RDTR dalam jadwal perencanaan.
9	Honorarium FPR belum tuntas. Status pada Triwulan III belum dilaporkan.	Tuntaskan administrasi honorarium FPR.	Triwulan IV 2026	Anggaran dan standar administrasi honorarium FPR sejak awal tahun.
10	38 dari 245 permohonan ruang dikembalikan.	Evaluasi penyebab pengembalian permohonan.	Triwulan IV 2026	Standar waktu dan kelengkapan dokumen permohonan ruang.

No.	Permasalahan/Temuan Monev	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Periode Pelaksanaan	Keterkaitan dengan Renja Berikutnya
11	IPLT belum memiliki dokumen standar teknis. Uji baku mutu air limbah belum dilakukan. Pemanfaatan L2T2 rendah (suplai 3 m^3/hari dari kapasitas 25 m^3/hari). Data L2T2 Triwulan III belum dilaporkan.	Susun dokumen standar teknis IPLT dan jadwalkan uji baku mutu. Laporkan volume L2T2 bulanan. Pantau volume lumpur tinja terhadap target 14 m^3/hari.	Triwulan IV 2026	Kebutuhan dokumen standar teknis IPLT dan pengujian baku mutu. Target volume L2T2 dan kebutuhan operasional armada.
12	EFAKSI baru 5% dan OP irigasi belum dilaksanakan. Status keduanya pada Triwulan III belum dilaporkan.	Tetapkan target penyelesaian EFAKSI. Susun jadwal OP irigasi. Laporkan status EFAKSI dan OP irigasi.	Triwulan IV 2026	Database kondisi jaringan irigasi. Prioritas rehabilitasi berdasarkan kondisi jaringan.
13	Matriks RTL Triwulan III memuat ulang matriks Triwulan II. Status tindak lanjut 4 Agustus belum ditetapkan. Pelaporan operator di 4 lokasi belum lengkap.	Verifikasi ulang matriks RTL. Tetapkan status tindak lanjut 4 Agustus. Verifikasi laporan operator sebelum batas pelaporan.	Oktober 2026 (segera)	Penggunaan hasil evaluasi Triwulan III sebagai dasar Renja 2027.

4.2 Tindak Lanjut dalam Renja SKPD Tahun Berikutnya

Usulan berikut bersifat perbaikan proses dan perencanaan, bukan penambahan anggaran atau program baru. Setiap usulan perlu ditimbang terhadap urgensi, kewenangan, target kinerja, dan kemampuan fiskal.

1. Kesiapan dokumen teknis: survei kondisi dan uji tanah sebelum penyusunan DED, serta prioritas ruas berdasarkan kondisi kerusakan.
2. Pengadaan dan jadwal: kalender pengadaan yang memperhitungkan produksi aspal dan masa tunggu beton, serta persyaratan kapasitas penyedia.
3. Swakelola dan kontrak: mekanisme swakelola dengan standar teknis dan kebutuhan anggaran upah sebelum penganggaran, serta jadwal kontrak dengan batas penyelesaian dalam tahun anggaran.
4. Penataan ruang: urutan penetapan RTRW dan RDTR dalam jadwal perencanaan, standar dokumen permohonan ruang, dan anggaran administrasi honorarium FPR sejak awal tahun.
5. Air limbah dan irigasi: dokumen standar teknis IPLT, target volume L2T2, dan database kondisi jaringan irigasi.
6. Pengendalian dan pelaporan: PIC dan checklist pelaporan sejak awal tahun, verifikasi laporan, serta monitoring berjenjang dengan early warning.

4.3 Prioritas Penanganan

Prioritas disusun berdasarkan urgensi batas waktu, dampak terhadap target, dan tingkat kendali DPUPR.

- **Segera (Oktober 2026):** konfirmasi batas kontrak enam paket jembatan, status tiga pekerjaan SDA, status RISPAM, EFAKSI, OP irigasi, dan pemanfaatan L2T2 Triwulan III, serta verifikasi ulang matriks RTL.

- **Dalam sisa tahun anggaran:** percepatan jembatan dan program penunjang, penanganan lima ruas rusak berat dan uji mutu material, keputusan teknis swakelola, serta penuntasan honorarium FPR.
- **Renja tahun berikutnya:** butir pada 4.2, termasuk dokumen standar teknis IPLT dan urutan penetapan RTRW dan RDTR.

V. PENUTUP

Monev Triwulan II dan III menunjukkan kemajuan fisik pada sejumlah paket. Namun, tindak lanjut belum dapat dibuktikan secara utuh, dan sejumlah temuan berulang pada pelaporan, lintas sektor tata ruang, pemanfaatan IPLT dan L2T2, serta honorarium FPR. Monev berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan dasar perbaikan kinerja. Fungsi tersebut hanya berjalan apabila tindak lanjut dilaksanakan secara konsisten, dikoordinasikan sesuai kewenangan, dan hasil evaluasinya dimanfaatkan untuk menyempurnakan Renja 2027.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal 15 Oktober 2026

Paraf Hirarki	
Sekretaris Dinas	
JF Perencana Muda / Penyusun SK	

Kepala Dinas,

Ir. LALU RAHADIAN, MSi

NIP. 19671231 199201 1 117